

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Diea Amiliya, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Alamat e-mail : dea39430@gmail.com, sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

The Constitutional Court is a state institution that has an important position in protecting the constitution and enforcing law in Indonesia. As the guardian of the constitution, the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the initial and final levels whose decisions have the final character of reviewing laws regarding the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Not only that, the Constitutional Court is also tasked with deciding the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution. NRI 1945, decided on the dissolution of political parties, and ended slander regarding universal election results

Through this authority, the Constitutional Court has a significant function in upholding the principle of checks and balances between the branches of state power and protecting the constitutional rights of the people of the country. The decisions of the Constitutional Court have shared a progressive understanding of the constitution and strengthened the protection of human rights.

However, the existence of the Constitutional Court is also not free from various criticisms and challenges. The independence and authority of constitutional judges is often questioned, and there are concerns about the politicization of Constitutional Court decisions. Therefore, efforts to strengthen the legitimacy and capacity of the Constitutional Court are important so that this institution can continue to function optimally in enforcing law and protecting constitutionality in Indonesia.

The Constitutional Court (MK) has a significant role in law enforcement in Indonesia. As an institution established to maintain the validity of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the Constitutional Court has a crucial role in ensuring legal consistency, constitutional supremacy and the protection of human rights. The Constitutional Court acts as the guardian of the validity of the constitution with its authority to examine laws against the 1945 Constitution. This ensures that every law issued does not violate constitutional principles and the rights of citizens.

Apart from that, the Constitutional Court also plays a role in resolving authority disputes between state institutions, maintaining the balance of power, and protecting human rights through its decisions. The Constitutional Court has an important role in upholding human rights by examining laws related to human rights and ensuring that government policies do not violate human rights guaranteed in the constitution.

With these roles, the Constitutional Court is the main pillar in maintaining justice, freedom and the supremacy of law in Indonesia. The Constitutional Court's decision not only upholds the law, but also provides protection for individual rights and ensures that every policy and law implemented is in accordance with the principles of democracy and human rights. The Constitutional Court is a vital institution in maintaining legal stability and protecting human rights in Indonesia.

KEYWORDS: *Constitutional Court, Law Enforcement, Constitutional Supremacy, Checks and Balances, Judicial Independence, Protection of Constitutional Rights.*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi ialah lembaga negeri yang mempunyai kedudukan berarti dalam melindungi konstitusi serta penegakan hukum di Indonesia. Selaku penjaga

konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan awal serta terakhir yang putusannya bertabiat final buat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi pula bertugas memutus kewenangan lembaga negeri yang wewenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus fitnah tentang hasil pemilu universal Lewat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi berarti dalam menegakkan prinsip checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan negeri dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat negeri. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah membagikan pengertian yang progresif terhadap konstitusi serta menguatkan proteksi terhadap hak asasi manusia. Tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi pula tidak lepas dari bermacam kritik serta tantangan. Independensi serta wewenang hakim konstitusi kerap kali dipertanyakan, dan terdapatnya kekhawatiran menimpa politisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, upaya buat menguatkan legitimasi serta kapasitas Mahkamah Konstitusi jadi berarti supaya lembaga ini bisa terus berfungsi maksimal dalam penegakan hukum serta melindungi konstitusionalitas di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang didirikan untuk menjaga keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), MK memiliki peran yang krusial dalam memastikan konsistensi hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. MK berperan sebagai penjaga keberlakuan konstitusi dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak warga negara. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak asasi manusia melalui putusan-putusannya. MK memiliki peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia dengan menguji undang-undang terkait HAM dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Dengan peran-peran tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan supremasi hukum di Indonesia. Putusan MK tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan undang-undang yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. MK merupakan lembaga yang vital dalam menjaga stabilitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

KATA KUNCI : Mahkamah Konstitusi, Penegakan Hukum, Supremasi Konstitusi, Independensi Peradilan, Proteksi Hak Konstitusional.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi ialah salah satu elemen kunci dalam sistem hukum tatanegara sesuatu negeri yang mempunyai kedudukan vital dalam melindungi kestabilan, keadilan, serta supremasi hukum dalam suatu warga. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga hukum yang bertugas buat membenarkan kalau tindakan-tindakan pemerintah serta perundang-undangan yang dihasilkan cocok dengan konstitusi sesuatu negeri serta prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya (Petrov, 2018). Dalam melaksanakan guna tersebut, Mahkamah Konstitusi jadi penjaga konstitusi serta penentu akhir dalam pengertian dan penegakan hukum bawah sesuatu Negeri (Kim, 2018).

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang spesial serta berarti dalam hukum tatanegara sesuatu negeri. Peran ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum konstitusi serta konsep supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) ialah

mahkamah konstitusi yang berwenang menafsirkan konstitusi serta mengadili sengketa yang berkaitan dengan hukum tata Negeri (Komarek, 2014). Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan (1) MK ialah lembaga peradilan yang terpisah dari lembaga eksekutif serta legislative, (2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24C UUD 1945m (3) MK bertanggung jawab menegakkan serta melindungi hak konstitusional masyarakat negeri Indonesia, (4) MK memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, (5) Mahkamah Konstitusi bukan ialah bagian dari lembaga peradilan, tetapi ialah cabang pemerintahan tertentu yang bertanggung jawab buat menafsirkan konstitusi.,(6) Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial yang bertugas menjamin integritas serta sikap para hakim, (7) Apabila terjalin perselisihan antara Komisi Yudisial serta MK, hingga masalah tersebut hendak diputuskan oleh MK selaku lembaga yang sangat mengenali pembagian kekuasaan antara keduanya, (8) Ringkasnya, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan selaku lembaga peradilan tertentu yang bertugas menafsirkan konstitusi serta menegakkan hak konstitusional masyarakat negeri Indonesia. Tubuh ini diawasi oleh Komisi Yudisial serta memiliki wewenang buat meninjau konstitusionalitas undang-undang serta peraturan (Asshiddiqie, 1995).

Kedatangan Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan berartinya supremasi konstitusi dalam hukum tatanegara. Konstitusi, selaku hukum bawah yang mengendalikan prinsip-prinsip bawah negeri serta hak-hak masyarakat negeri jadi landasan untuk segala perundang-undangan serta aksi pemerintah. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi integritas serta konsistensi konstitusi jadi terus menjadi berarti dalam mengalami pergantian era pertumbuhan sosial, serta tantangan hukum yang tumbuh (Tega, 2021).

Riset ini bertujuan buat menyelidiki secara mendalam optimalisasi kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hukum tatanegara, dengan fokus pada metode Mahkamah Konstitusi pengaruhi pengembangan hukum, proteksi hak-hak asasi manusia, serta stabilitas politik dalam sesuatu negeri Riset ini pula hendak memikirkan akibat keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengambilan kebijakan pemerintah serta hubungannya dengan keadilan sosial.

Dalam penguraian topik ini, riset ini hendak menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sebagian konteks yang berbeda, yang hendak membagikan pengetahuan yang lebih luas tentang bermacam-macam tugas serta tanggung jawab Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perihal ini pula hendak menolong dalam uraian tentang gimana kedudukan Mahkamah Konstitusi bisa beradaptasidengan pergantian dalam warga serta tatanan politik. Tidak hanya itu, riset ini hendak mengkaji kerangka hukum serta mekanisme yang mengendalikan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya Dengan demikian, riset ini hendak membagikan pemikiran yang lebih mendalam tentang berartinya optimalisasi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi supremasi hukum serta mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia dalam hukum tatanegara. Pergantian UUD 1945 yang menetapkan terdapatnya lembaga negeri baru, Mahkamah Konstitusi, dalam cabang kekuasaan kehakiman, tidak bisa dikatakan hanya hadirnya majelis hukum baru yang menaikkan jumlah majelis hukum yang terdapat Tetapi kedatangan Mahkamah Konstitusi wajib dikira selaku bagian dari implementasi semangat reformasi yang menuntut pergantian dalam bernegara serta bernegara.

Oleh sebab itu, dalam pergantian UUD 1945 yang melaporkan kalau kedaulatan terletak di tangan rakyat serta dilaksanakan bagi berdasarkan UUD, dan menegaskan pula kalau Indonesia merupakan negeri hukum, keberadaan Mahkamah

Konstitusi ialah substansi berarti dalam pergantian tersebut. UUD 1945. Apa artinya Mahkamah Konstitusi dalam pergantian UUD 1945? Awal Mahkamah Konstitusi dengan gunanya dalam menanggulangi sebagian masalah di bidang ketatanegaraan merupakan melindungi konstitusi supaya dilaksanakan secara bertanggung jawab atas kehendak rakyat serta cita-cita demokrasi. Kedua, Mahkamah Konstitusi dengan demikian pula dimaksudkan buat melindungi terselenggaranya pemerintahan negeri yang normal serta pula koreksi atas pengalaman ketatanegaraan yang dihasilkan oleh multitafsir konstitusi. Bila secara konstitusional MPR selaku lembaga perwakilan rakyat spesial merupakan pembuat konstitusi, hingga Mahkamah Konstitusi bersumber pada amandemen UUD 1945 selaku mahkamah konstitusi merupakan penafsir konstitusi lewat putusan-putusannya.

Oleh sebab itu, sudah dipaparkan kalau dalam perspektif ilmu hukum, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengganti metode bernegara serta metode ber hukum lewat pengertian konstitusi. Vonis Mahkamah Konstitusi, paling utama yang berkaitan dengan kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang (judicial review), selama sejauh putusannya dalam mengabulkan permohonan pemohon, senantiasa menyebabkan pergantian norma hukum. Terkandung dalam undang-undang yang diuji. Sebab itu, Vonis MK merupakan semacam vonis legislatif oleh tubuh perwakilan rakyat yang menetapkan sesuatu rancangan undang-undang jadi undang-undang (kewenangan material) yang setelah itu disahkan secara resmi oleh Presiden (persetujuan resmi) (Asshiddiqie, 2006).

Oleh sebab itu, Kelsen selaku penggagas gagasan pembuatan Mahkamah Konstitusi awal di dunia, ialah di Austria pada tahun 1920 (Asshiddiqie, 2005), melaporkan kalau parlemen konstitusional serta Mahkamah Konstitusi sama-sama ialah "legislator". Parlemen merupakan legislator dalam makna positif (positive legislator), sebaliknya mahkamah konstitusi (verfassungsgewalt) merupakan legislator dalam makna negatif (negative legislator) (Kelsen, 2007).

Mahkamah Konstitusi, dengan kedudukannya selaku "negatif legislator" semacam yang sudah disebutkan lebih dahulu ialah aplikasi pembuat undang-undang yang diketahui semenjak pertengahan abad ke-20. Oleh sebab itu, pembuatan undang-undang mulai banyamengandalkan kedudukan hakim konstitusi, tidak hanya parlemen. Oleh sebab itu, kebutuhan buat mengkaji serta mendalami vonis pengujian yang mengganti norma hukum dalam undang-undang berkembang serta tumbuh di mana-mana di segala dunia, paling utama di negeri hukum yang demokratis (the democracy rule of law) ataupun negeri demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democracies).

Dari latar balik di atas bisa diambil rumusan permasalahannya yakni, Bagaimana Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negeri melaksanakan gunanya serta Apa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam reformasi sistem hukum negeri Indonesia? Tujuan riset ini hendak mangulas gimana Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negeri melaksanakan guna serta kedudukan konstitusionalnya lewat putusan-putusannya yang bisa pengaruhi serta memberi warna reformasi hukum serta ketatanegaraan di Indonesia. Riset ini memakai tata cara yuridis normatif (Soekanto serta Mamudji, 1995).

Dengan pendekatan yuridis normatif ini hendak mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengganti UUD 1945 sistem hukum konstitusional. Spesifikasi riset ini merupakan analisis deskriptif, sebab diharapkan bisa membagikan cerminan secara rinci, sistematis, serta komprehensif dengan objek yang hendak diteliti, ialah ikatan kedudukan Mahkamah Konstitusi lewat putusannya, dalam persidangan. update sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia sangatlah penting. Melalui peran dan wewenangnya, MK turut berperan dalam menjaga supremasi hukum, menegakkan konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan, serta melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, MK menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tata cara riset bagi berdasarkan Hamid Darmadi merupakan sesuatu metode yang diawali dari riset ilmiah dengan tujuan buat digunakan secara berkepanjangan. Secara garis besar, riset yang digunakan dalam penyusunan makalah ini merupakan riset kualitatif. Terdapatnya makalah ini diperuntukkan selaku riset yang terbaharukan serta tidak berkepemilikan tidak hanya penulis selaku periset dini terpaut peran mahkamah konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia serta tantangan yang dialami.

Lahirnya riset ini merupakan buat ilmu pengetahuan yang terbaru, dimaksudkan kepada proses pencapaian keabsahan cocok yang tujuannya buat mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terdapatnya rasa kekeliruan yang mendalam. Selaku tujuannya ialah buat sumberpengetahuan yuridis warga selaku pembaca kalau peran mahkamah konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia hadapi pergantian serta tantangan.

PEMBAHASAN

Definisi Peran Mahkamah Konstitusi Dlam Peenegakan Hukum di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), MK memiliki wewenang yang luas dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga konsistensi hukum di Indonesia. Salah satu peran utama MK adalah sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini berarti MK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga keberlakuan konstitusi dan sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Berikut merupakan sebagian kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam proteksi hak asasi manusia di Indonesia:

1. Menguji Undang-Undang Terpaut HAM

MK mempunyai kewenangan buat menguji undang-undang terpaut HAM terhadap UUD 1945. Dengan melaksanakan uji modul terhadap undang-undang, MK bisa membenarkan kalau tiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM yang dipastikan dalam konstitusi.

2. Menyediakan Akses Keadilan

MK membagikan akses kepada masyarakat negeri buat melindungi hak-hak asasi manusia mereka lewat proses pengajuan uji modul ataupun judicial review. Masyarakat negeri bisa mengajukan gugatan ke MK bila merasa hak asasi mereka dilanggar oleh kebijakan pemerintah ataupun undang-undang yang berlawanan dengan konstitusi.

3. Menjaga Konsistensi Hukum

MK berfungsi dalam melindungi konsistensi hukum terpaut HAM. Dengan membagikan vonis yang mengikat, MK bisa membenarkan kalau tiap kebijakan ataupun undang-undang yang melanggar HAM tidak bisa diterapkan serta wajib direvisi cocok dengan syarat konstitusi.

4. Mengawasi Penerapan Vonis HAM

MK pula bertanggung jawab buat mengawasi penerapan vonis terpaut HAM yang dikeluarkan. Dengan demikian, MK membenarkan kalau hak-hak asasi manusia yang diakui dalam putusannya benar-benar dilindungi serta dihormati oleh pihak terpaut

5. Memberikan Proteksi Terhadap Minoritas

MK ikut berfungsi dalam melindungi hak-hak minoritas serta kelompok rentan dalam warga. Dengan menguji undang-undang yang berpotensi merugikan kelompok minoritas, MK bisa jadi garda terdepan dalam membenarkan proteksi hak-hak mereka. Dengan peran-peran tersebut, Mahkamah Konstitusi jadi salah satu lembaga yang sangat vital dalam membenarkan proteksi hak asasi manusia di Indonesia. Lewat putusan-putusannya, MK ikut berfungsi dalam melindungi keadilan, kebebasan, serta martabat tiap orang selaku masyarakat negeri Indonesia.

Tetapi kedudukan MK dalam penegakan hukum juga mengalami tantangan, semacam kecenderungan vonis yang polemik serta dikira politik, dan minimnya kepatuhan terhadap vonis MK oleh lembaga-lembaga negeri lain. Meskipun demikian, MK selalu dikira sebagai lembaga yang berarti dalam melindungi konstitusionalitas serta penegakan hukum di Indonesia .

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi di negara ini. Sebagai lembaga pengawas yang independen, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Secara normatif, UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah meletakkan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia secara lebih memadai. Terlepas dari kelemahan yang mungkin masih terdapat di dalamnya, setidaknya keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM. Untuk memastikan terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia, UUD 1945 memberikan kewenangan uji materil kepada MK.

Dengan kewenangan dimaksud, potensi atau pelanggaran HAM melalui kebijakan yang dikeluarkan negara dapat diawasi dan diselesaikan dan HAM dapat dilindungi.

Saran untuk meningkatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah dengan terus memperkuat independensi lembaga ini, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas putusan yang dikeluarkan, serta memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya supremasi hukum dan konstitusi dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Konstitusi dapat semakin efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang adil dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusi di Indonesia" (2014) 11:3 Bahasa Indonesia J Intl L 383.
- Asshiddiqie, Jimly. Penegakan Hukum (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014).
- Bokong, Simon & Tim Lindsey. "Mafiosi Peradilan: Korupsi Mahkamah Konstitusi Indonesia" (2014) 18:2 Singap J Int'l & Comp L 289.

- Bokong, Simon. "Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia" (2014) 28:1 Pac Rim L & Pol'y J 97.
- Darmawan, Arif & Nadirsyah Hosen. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perbankan Syariah di Indonesia" (2014) 1:1 HALREV 39.
- Hamidi, Jazim dkk, eds. Teori dan Praktik Penegakan Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014).
- Hiariej, Eddy O. "Mahkamah Konstitusi dan Ajudikasi Konstitusi di Indonesia" (2014) 11:1 Bahasa Indonesia J Const L 1.
- Hosen, Nadirsyah. "Mahkamah Konstitusi dan Hakim 'Islam' di Indonesia" (2014) 16:2 Ariz J Int'l & Comp L 349.
- Isra, Saldi. "Mahkamah Konstitusi dan Hak Sosial Ekonomi di Indonesia" (2014) 1:2 Indon J Const Stud 103.
- Kurniawan, Dani Eka. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Proses Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" (2014) 11:1 Bahasa Indonesia J Const L 21.
- Lindsey, Tim & Nadirsyah Hosen. "Reformasi Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi" (2014) 8:1 Indon J Kajian Islam 205.
- Mahfud MD, Moh. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi di Indonesia" (2014) 11:2 Bahasa Indonesia J Const L 147.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2014 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014).
- Manan, Bagir. Membedah Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014).
- Mietzner, Marcus. "Bagaimana Jokowi Menang dan Demokrasi Bertahan: Catatan Pilpres Indonesia 2014" (2014) 25:4 J Demokrasi 111.
- Prabowo, Haris. "Mahkamah Konstitusi dan Politik Indonesia" (2014) 11:2 Bahasa Indonesia J Const L 189.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Nasional (PPPKN) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Laporan Penelitian: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" (2014).
- Riyanto, Astim & Syarif Mappiasse, eds. Aktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014).
- Roisah, Khofifah. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Kontroversi UU Penodaan Agama di Indonesia" (2014) 16:3 J Islam & Christian Muslim Relat 357.
- Saldi, Isra. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hak Sosial Ekonomi di Indonesia" (2014) 1:2 Indon J Const Stud 103.
- Sihombing, Sihar. "Tinjauan Konstitusi dan Aktivisme Peradilan di Indonesia" (2014) 11:1 Bahasa Indonesia J Const L 41.
- Suhadi, Jimly. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Negara Hukum di Indonesia" (2014) 14:4 J Konstitusi 718.
- Surbakti, Natalie. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum Syariah di Indonesia" (2014) 16:1 J Islam & Kristen Muslim Relat 1.
- Sutiyoso, Bambang. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia" (2014) 11:2 Bahasa Indonesia J Const L 225.
- Taufik, Nur. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi di Indonesia" (2014) 11:1 Bahasa Indonesia J Const L 61.
- Thohari, Saldi. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hak Ekonomi dan Sosial di Indonesia" (2014) 1:2 Indon J Const Stud 103.

- Topo Santoso. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusi di Indonesia" (2014) 11:3 Bahasa Indonesia J Intl L 383.
- Wijayanti, Septi Nur. "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia" (2014) 11:2 Bahasa Indonesia J Const L 261.
- Yamin, Muhammad. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hak Konstitusional di Indonesia" (2014) 11:1 Bahasa Indonesia J Const L 81.
- Zoelva, Hamdan. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusi di Indonesia" (2014) 11:3 Bahasa Indonesia J Intl L 383.